

**Pemerintah Asia Tenggara harus mengambil momen, memberlakukan langkah-langkah untuk pemulihan hijau dari COVID-19, menurut laporan baru**

Meskipun Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan paling berisiko di dunia dari dampak perubahan iklim, pemerintah di kawasan itu gagal memanfaatkan peluang untuk membangun kembali dengan lebih baik dari pandemi COVID-19 dengan memperkenalkan langkah-langkah pemulihan yang membantu mendorong transisi ke ekonomi hijau, demikian temuan sebuah laporan baru. Banyak yang justru menggunakan paket pemulihan COVID-19 untuk memberlakukan kebijakan yang menyumbang pemanasan global dan menciptakan hambatan besar bagi transisi ke ekonomi rendah karbon.

Laporan baru yang berjudul "Membangun Kembali dengan Lebih Baik: Transisi Asia Tenggara menuju ekonomi hijau setelah COVID-19", yang diterbitkan hari ini oleh Anggota Parlemen ASEAN bagi Hak Asasi Manusia (*ASEAN Parliamentarians for Human Rights*, APHR), mengevaluasi langkah-langkah pemulihan pandemi yang diambil oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Timor-Leste antara Februari 2020 dan April 2021.

"Pandemi COVID-19, dan resesi ekonomi yang mengikutinya, dengan tajam menyoroti ketidakadilan mendarah daging dalam model ekonomi kita saat ini, yang sudah terlalu lama mengejar keuntungan lebih dari manusia dan lingkungan, memperburuk kesenjangan yang ada, dan tidak melakukan apa pun untuk melindungi mereka yang paling rentan," kata Charles Santiago, ketua APHR dan Anggota Parlemen Malaysia. "Pemulihan ekonomi dari pandemi telah menghadirkan peluang sempurna untuk berubah menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan yang bekerja bagi semua orang."

"Sementara pemerintah kita sejauh ini terlampau banyak gagal dalam menerapkan perubahan kebijakan yang sangat dibutuhkan, sebagai anggota parlemen kita memiliki peran penting untuk dimainkan, dan harus melakukan segala yang kita bisa untuk mendesak para pemimpin di kawasan kita untuk berinvestasi dalam kebijakan cerdas untuk suatu transisi hijau," kata Santiago.

APHR menemukan bahwa pemerintah telah mengadopsi langkah-langkah kebijakan hijau terbatas sebagai bagian dari rencana pemulihan COVID-19 nasional mereka, dengan contoh-contoh termasuk subsidi dan pengurangan pajak untuk produk ramah lingkungan, kenaikan pajak untuk produk yang berbahaya bagi lingkungan, serta investasi dalam transportasi bersih dan infrastruktur energi.

Namun, langkah-langkah ini dirusak dengan serius oleh banyak "kebijakan coklat" yang meningkatkan emisi gas rumah kaca (GRK). Misalnya, dana talangan tanpa ikatan hijau untuk bisnis penghasil GRK tinggi seperti penerbangan, minyak dan gas, dan pengembangan lahan melebihi 50 miliar dollar AS di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura.

Isu tentang bagaimana mengatasi perubahan iklim sangat tepat waktu, menjelang Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26) 2021, yang akan dimulai di Glasgow, Skotlandia, pada akhir Oktober, kata APHR.

"Sungguh mengejutkan bahwa sementara para ilmuwan dunia terus memperingatkan kita bahwa kita kehabisan waktu, dan sementara orang-orang dan ekonomi di kawasan itu semakin merasakan dampak perubahan iklim, pemerintah kita terus mendukung industri yang sangat memancarkan emisi masa lalu. alih-alih berinvestasi di industri energi bersih masa depan," kata Mercy Barends, Anggota Dewan APHR dan anggota parlemen Indonesia.



Di antara negara-negara yang menjadi pusat perhatian, Singapura memiliki langkah-langkah pemulihan paling banyak lintas sektor yang mendukung pemulihan hijau, sedangkan Indonesia dan Filipina memiliki langkah-langkah pemulihan paling berlawanan, menurut temuan APHR.

"Memulai pemulihan hijau akan memiliki manfaat besar bagi kawasan kita. Tidak hanya membantu membatasi pemanasan global, tetapi juga membantu kita pulih lebih cepat dari pandemi, serta membangun ekonomi yang lebih tangguh," kata Pita Limjaroenrat, seorang anggota parlemen dan APHR Thailand.

"Para pembuat undang-undang berada di pusat pemenuhan komitmen perubahan iklim, apakah itu melalui peran kami dalam mendorong undang-undang progresif, mengawasi anggaran nasional, atau dalam mandat kami untuk menjadi suara bagi konstituen kami, yang akan paling terpengaruh oleh perubahan iklim jika tidak ada tindakan. diambil," katanya.